



**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS
PENGADAAN ALUTSISTA TENTARA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta**

AMELIA FARISSA DEVI

1710622041

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Amelia Farissa Devi
NRP : 1710622041
Tanggal : April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Amelia Farissa Devi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a'lam, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis ini berhasil diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan pula kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah* bagi semua umat manusia, beserta keluarga, sahabat dan umat-umatnya.

Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2015 ini adalah “Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alusista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)”, yang penulis ajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Terima kasih penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA.
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Yth. Ketua Jurusan Hukum, Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N
4. Yth Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, yang adalah Pembimbing I
5. Yth. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat berguna bagi semua pihak yang sempat membacanya, serta menambah bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang berkepentingan dengan masalah ini.

Jakarta, 07 April 2019

Penulis,



Amelia Farissa Devi

PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :

Nama : Amelia Farissa Devi
NRP : 1710622041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji




Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH., M.Hum
Penguji I / Pembimbing I



Dr. Mohammad Hatta, SH., MKn.
Penguji / Pembimbing II



Dwi Desi Yuyi Tarina, SH., MH
Dekan



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 2019

**KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PENGADAAN
ALUTSISTA TENTARA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)**

AMELIA FARISSA DEVI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, atas kerugian negara dari penyalahgunaan kewenangannya dalam pengadaan alusista TNI. Dan untuk mengetahui pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Teddy Hernayadi, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asas Pertanggung Jawaban dan Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 telah dilakukan melalui sistem memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera), kemudian diajukan pada tingkat banding hingga kasasi di Mahkamah Agung. Dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada studi Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 adalah berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang melekat pada Terdakwa sebagai Mabidiakbia Pusku Kementerian Pertahanan RI, serta merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

**STUDY ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ON THE PROCUREMENT
OF ALUTSISTA OF THE NATIONAL ARMY OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

(Study of Decision Number 363K / MIL / 2017)

AMELIA FARISSA DEVI

ABSTRACT

This research was conducted to find out the form of criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of corruption committed by officials in the Indonesian National Armed Forces, for state losses from misuse of their authority in procuring alusista TNI. And to find out the consideration of military judges in the imposition of criminal sanctions for the perpetrators of corruption, Teddy Hernayadi, who has permanent legal force.

The theory used in this study is the Principle of Responsibility Principle and Theory of Mistakes in Criminal Law. The research method used in this thesis is a normative juridical and empirical juridical approach.

The normative juridical approach is carried out to understand the problem by remaining or relying on the field or legal studies, while the empirical juridical approach is carried out to obtain clarity and understanding of research problems based on existing realities.

The results of this study conclude that criminal liability imposed by judges on perpetrators of corruption who commit abuse of authority in procuring alusista TNI in the study of Decision Number 363 K / MIL / 2017 has been carried out through a system of integrating the general criminal justice system with a part of the military justice system, especially in the investigation process by investigating officials in force now. By involving the role of the Commander as the Supervisor who has the right to punish (Ankum) and involving the officer in the case surrender (Papera) as part of the system. Constraints in this process are in the case of delegation of cases by the Prosecutor as a public prosecutor to the court, must be a decree from the Dispatching Officers (Skeppera), then submitted to the appeal level to appeal at the Supreme Court. The basic consideration of military judges in criminal prosecution for perpetrators of corruption in the environment of the Indonesian National Army in the study of Decision Number 363 K / MIL / 2017 is related to abuse of position attached to the Defendant as Mabidiakbia Pusku Ministry of Defense, and concurrently as Special Treasurer of Bialugri (Foreign Exchange) Pusku Ministry of Defense of the Republic of Indonesia where the Defendant's actions contradict Article 3 Paragraph (1) of Law Number 17 Year 2014 concerning State Finance, Article 10 Paragraph (5) Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury, and Joint Ministerial Regulations Finance of the Republic of Indonesia and Minister of Defense of the Republic of Indonesia Number 67 / PMK.05 / 2013 and Number 15 of 2013 dated March 27, 2013 concerning the State Budget Implementation Mechanism within the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia and the TNI.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Farissa Devi
NRP : 1710622041
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : April 2019

Yang menyatakan,



Amelia Farissa Devi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	9
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	21
2.2 Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi	24
2.3 Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.4 Subjek Tindak Pidana Korupsi	44
2.5 Kebijakan Tindak Pidana Korupsi Dalam Lintas Sejarah	51
2.6 Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.....	57
2.7 Dasar Hubungan Pelaku Tindak Pidana Menurut Ajaran Pertanggung Jawaban Pidana.....	61
2.8 Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	83
3.1 Pendekatan Masalah.....	83
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	82
3.3 Penyajian Data	84
3.4 Analisis Data.....	84
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	87
4.1 Kasus Posisi Perkara Pidana Militer Tingkat Kasasi Putusan Nomor 363K/MIL/2017	87
4.2 Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi	97
4.3 Putusan Hakim	98
4.4 Pembahasan.....	99
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	ix
RIWAYAT HIDUP	xiii